

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perluasan dan peningkatan mutu pendidikan adalah salah satu tuntutan masyarakat pada aspek pendidikan. “Dengan kondisi geografis dan pendapatan daerah yang beragam berakibat kepada variasi capaian pembangunan, salah satunya pembangunan pendidikan”, (Candiasana, 2013, hlm 118). Pendidikan mempunyai peran dalam turut serta pembangunan bangsa, oleh sebab itu pendidikan menjadi salah satu hal yang serius yang menjadi perhatian bangsa. Beberapa capaian pembangunan Indonesia dari dimensi pendidikan dalam ukuran kacamata global juga masih menunjukkan ketertinggalan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar juga jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan

Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengetahui pemerataan dan akses pendidikan yaitu dengan APS (angka partisipasi sekolah). Semakin tinggi APS, Jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan pun semakin besar (Pujiyanti,2012).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, (BPS, 2018, hlm 43-45) mengungkapkan data statistik angka partisipasi sekolah sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2018 menyatakan bahwa partisipasi sekolah terfokus pada kelompok umur 7-18 tahun. Dapat terlihat juga bahwa masih terdapat 5,45 % penduduk usia 25 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan atau masih ada setidaknya 5 dari 100 penduduk di atas 25 tahun yang belum pernah merasakan bangku sekolah seumur hidup mereka. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan terdahulu belum dapat menggapai seluruh lapisan masyarakat.

Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia tahun 2017 adalah 8,5 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk Indonesia hanya mampu sekolah sampai dengan jenjang pendidikan menengah pertama. Ini menunjukkan masih rendahnya capaian pendidikan penduduk Indonesia. Artinya keterbatasan akses pendidikan dan keberlanjutan sekolah masih menjadi alasan rendahnya daya saing bangsa.

Pencapaian hasil pendidikan antar wilayah perdesaan dan perkotaan, antara laki dan perempuan, antara penduduk miskin dan kaya, antara kelompok rentan masih menunjukkan adanya kesenjangan, meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk memperkecil *gap* yang ada, namun kesenjangan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan manusia ini. Termasuk di dalamnya kesenjangan dalam pendidikan.

Pendidikan yang belum merata juga dapat dilihat dari masih tingginya angka putus sekolah, terutama pada tingkat SMA/Sederajat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018 menyebutkan bahwa tahun ajaran 2017/2018 jumlah siswa SMA putus sekolah mencapai 31.123 orang terdiri dari 17.189 orang laki-laki dan 13.934 orang perempuan, sedangkan di Provinsi Jawa Barat jumlah siswa SMA putus sekolah mencapai 7.138 orang.

Data yang diperoleh dari Kemendikbud juga menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah siswa SMA putus sekolah paling tinggi, selain itu menurut Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik), “Angka putus sekolah di Jabar sangat mengkhawatirkan, seharusnya pembangunan SDM Pendidikan harus menjadi program prioritas.”

Jenjang pendidikan yang semakin tinggi, diikuti juga dengan angka putus sekolah yang semakin besar. Pada tahun 2018, lima dari 1000 anak SD putus sekolah. Namun angka tersebut semakin besar pada jenjang SM/Sederajat, dimana 29 dari 1000 anak SM/Sederajat putus sekolah. Sejalan dengan angka melanjutkan, angka putus sekolah di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan. Selisih angka perkotaan dan perdesaan semakin besar seiring semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak siswa putus sekolah. Sementara itu, angka putus sekolah laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan pada seluruh jenjang pendidikan (<https://bps.go.id>).

Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk dalam Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2017 mencapai 3,657,701 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki berjumlah 1,853,603 jiwa dan perempuan 1,804,098 jiwa, Kecamatan Baleendah memiliki jumlah penduduk terbanyak mencapai 266,198 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki 135,332 jiwa dan perempuan 130,860 jiwa.

Tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung dengan jumlah persentase penduduk yang mengenyam pendidikan yaitu 85% dan 15% diantaranya putus sekolah. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bandung sadar akan pentingnya pendidikan, namun belum berkesempatan untuk mengenyam pendidikan ke jenjang lebih tinggi dikarenakan berbagai macam hal.

Dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi seluruh warga sekolah, langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuka berbagai jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, non formal dan informal. Ketiga jalur pendidikan tersebut saling melengkapi dan memperkaya dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional membuka program pendidikan Nonformal berupa Program Pendidikan Kesetaraan salah satunya yaitu pendidikan kesetaraan Paket C setara SMA/MA.

“Hadirnya pendidikan kesetaraan merupakan salah satu solusi dalam mengatasi masalah putus sekolah yaitu dengan dibukanya jalur pendidikan non formal dan informal, hal itu ditujukan untuk memberikan pelayanan setara SD, SMP, SMA atau yang sederajat kepada warga masyarakat karena sesuatu hal kebutuhan pendidikannya tidak mungkin ditempuh melalui jalur pendidikan formal.” (Farida, 2018, hlm 3)

“Pendidikan Kesetaraan Program Paket C sebagai bagian dari pendidikan non formal ditujukan untuk masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan SMA/MA sederajat.” (Handayani, 2017). Program ini setara dengan jalur pendidikan formal SMA/MA sederajat, warga belajar yang mengikuti program kesetaraan kebanyakan adalah lulusan SMP/MTs sederajat yang sudah bekerja dan tidak memiliki cukup waktu untuk mengikuti pendidikan formal.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang dilakukan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal diharapkan menciptakan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMA/MA. (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, 2016: hlm 5).

Program kesetaraan sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan wajib belajar pendidikan dasar, selain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan bagi semua anggota masyarakat. Satuan pendidikan non formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Fungsi dan tujuan pendidikan kesetaraan selama ini tetap relevan karena masih besarnya jumlah anak putus sekolah dalam maupun antar jenjang pendidikan; masih tetap adanya jumlah penganggur terutama usia muda dari tahun ke tahun; serta kenyataan konsekuensi dari kondisi geografis dan adanya ketimpangan tingkat kemajuan pembangunan di Indonesia sehingga masih menghadirkan adanya daerah terluar, terdepan (perbatasan) dan tertinggal atau dikenal dengan daerah 3 T; adanya beberapa daerah rawan bencana atau konflik. (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, 2017, hlm 4).

Oleh karena itu kehadiran negara untuk menyediakan pendidikan kesetaraan tetap diperlukan. Masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan banyaknya masyarakat yang sudah bekerja dan belum memiliki ijazah sebagai pengakuan kualifikasi akademiknya, mengindikasikan keberadaan pendidikan kesetaraan dapat menjadi pendidikan alternatif bagi masyarakat.

Pendidikan kesetaraan diselenggarakan pada tiap kabupaten di Indonesia tanpa terkecuali di kabupaten Bandung. Data menunjukkan bahwa masih banyaknya angka putus sekolah di Kabupaten Bandung yang diakibatkan dari berbagai faktor. Hal ini didukung oleh informasi dari BPS tahun 2018 di Kabupaten Bandung. Kondisi geografis dan jumlah penduduk yang terus meningkat di kabupaten ini, membuat pemerintah setempat tidak berhenti berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakatnya, salah satunya yaitu dengan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan.

Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan dasar dan menengah. Hal tersebut disesuaikan dengan konteks pendidikan kesetaraan dan fungsionalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kurikulum yang berlaku di Indonesia yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sudah mulai ditetapkan pada semua jenjang pendidikan mulai tahun 2014 Instruksi implementasi kurikulum 2013 dilandasi oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 81 A Tahun 2013. Pemerintah juga sudah mengintruksikan pendidikan kesetaraan paket C untuk melaksanakan kurikulum 2013.

“Dalam Kurikulum 2013, proses pembelajaran merupakan salah satu elemen dari standar proses yang mengalami perubahan guna pencapaian keberhasilan pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa” (Lestari, 2018). Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan proses pembelajaran di kurikulum 2013 pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa.

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa dimana dilaksanakan oleh guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan sarana dan fasilitas pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum, sehingga dalam hal ini, pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan seharusnya senantiasa responsif terhadap dinamika yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Hidayat (2013: 128) merumuskan beberapa perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran dalam Kurikulum 2013 sebagai berikut: standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan

Gandis Sastia Dewi, 2019

STUDI IMPLEMENTASI PROSES PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C BERBASIS KURIKULUM 2013 (STUDI DESKRIPTIF ANALITIS DI SPNF SKB KABUPATEN BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Kemudian, kegiatan pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sehingga, guru bukan satu-satunya sumber belajar, serta dalam menerapkan kompetensi sikap guru tidak mengajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan.

Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan dalam kegiatan proses pembelajarannya diharapkan dapat melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar siswa yang disesuaikan dengan ketentuan dalam kurikulum 2013, agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

SPNF SKB Kabupaten Bandung sebagai salah satu penyelenggara pendidikan Nonformal, sudah melaksanakan kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 di pendidikan kesetaraan paket C diterapkan tingkatan 5 atau setara dengan kelas X, sedangkan kelas XI dan XII masih menerapkan kurikulum lama. Menurut wawancara kepada salah satu tutor/pengajar di SPNF SKB Bandung menyebutkan bahwa sudah dilakukan persiapan dalam pelaksanaan kurikulum 2013, yaitu salah satunya dengan mencermati dokumen kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan paket C, langkah ini dilakukan untuk memahami filosofi dan struktur kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan. Selain itu, tutor wajib membaca silabus mata pelajaran dan modul, hal ini dilakukan agar dapat menetapkan materi pelajaran yang akan dibelajarkan, bentuk pembelajaran (tatap muka, tutorial dan atau mandiri) serta alokasi waktu yang diperlukan. Analisis modul ini menjadi penting sebagai dasar untuk menyusun RPP agar sesuai dengan pelaksanaan yang sesungguhnya.

Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui kesiapan implementasi kurikulum 2013 pada tingkat pendidikan kesetaraan paket C. Guna menjawab masalah di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “**Studi Implementasi Proses Pembelajaran Pada Pendidikan Kesetaraan Paket C berbasis Kurikulum 2013 (Studi Deskriptif Analitis di SPNF SKB Kabupaten Bandung)**”. Melalui adanya penelitian ini diharapkan dapat dideskripsikan (1) Bagaimana perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 di Pendidikan Kesetaraan Paket C (2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 di pendidikan

Gandis Sastia Dewi, 2019

STUDI IMPLEMENTASI PROSES PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C BERBASIS KURIKULUM 2013 (STUDI DESKRIPTIF ANALITIS DI SPNF SKB KABUPATEN BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kesetaraan paket C (3) Bagaimana penilaian hasil belajar berbasis kurikulum 2013 di pendidikan kesetaraan paket C (4) Bagaimana hambatan dan solusi keterlaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 (5) Apa saja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi dan kesempatan belajar siswa dalam upaya meningkatkan pemerataan pendidikan?

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kurikulum 2013 pada pendidikan kesetaraan paket C di SPNF SKB Kabupaten Bandung ? Adapun perincian rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 pada Pendidikan Kesetaraan Paket C SPNF SKB Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 pada Pendidikan Kesetaraan Paket C SPNF SKB Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana penilaian hasil belajar berbasis kurikulum 2013 pada Pendidikan Kesetaraan Paket C SPNF SKB Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana penghambat serta solusi dalam keterlaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 pada Pendidikan Kesetaraan Paket C SPNF SKB Kabupaten Bandung?
5. Apa saja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi dan kesempatan belajar siswa dalam upaya meningkatkan pemerataan pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran serta informasi mengenai implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran di pendidikan kesetaraan paket C SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 pada pendidikan Kesetaraan Paket C SPNF SKB Kabupaten Bandung.
2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 pada Pendidikan Kesetaraan Paket C SPNF SKB Kabupaten Bandung.
3. Penilaian hasil belajar berbasis kurikulum 2013 pada Pendidikan Kesetaraan Paket C SPNF SKB Kabupaten Bandung.
4. Penghambat serta solusi dalam keterlaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 pada Pendidikan Kesetaraan Paket C SPNF SKB Kabupaten Bandung.
5. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi dan kesempatan belajar siswa dalam upaya meningkatkan pemerataan pendidikan?

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh tenaga kependidikan ataupun pihak terkait dalam pendidikan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berharga untuk penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan yaitu dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini dan masukan yang positif dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum 2013 khususnya pada pendidikan kesetaraan paket C.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Lembaga dan Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan bagi peningkatan berbagai usaha dalam mengembangkan dan melaksanakan kurikulum 2013 di pendidikan kesetaraan paket C SPNF SKB Kabupaten Bandung.

b. Bagi Tutor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan profesionalitas diri, sehingga mampu mengembangkan dan melaksanakan kurikulum 2013, serta meningkatkan motivasi dan peran tutor dalam menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan peserta didik

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berfikir ilmiah kepada mahasiswa mengenai kurikulum, terutama kurikulum 2013.

d. Bagi Jurusan

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak jurusan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan, terutama di bidang implementasi kurikulum 2013.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Merupakan pemaparan bahasan yang berkaitan dengan alasan dilaksanakannya penelitian. Bahasan pada bab ini secara lebih jelas terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

BAB II Kajian Pustaka

Merupakan pembahasan yang berkaitan dengan pemaparan teori dan landasan teori yang mendukung penelitian yang dilaksanakan.

BAB III Metode Penelitian

Merupakan pemaparan dari alur penelitian yang dilaksanakan meliputi pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik analisis data dan prosedur penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan pemaparan mengenai deskripsi hasil dari penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Merupakan pemaparan dari simpulan yang berisikan poin utama dari hasil penelitian, implikasi dan rekomendasi penelitian atas penelitian yang dilakukan